

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERAN KINERJA
PEMERINTAH DESA SEBAGAI PEMEDIASI (STUDI DI DESA SE-
KABUPATEN JENEPONTO)**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON
COMMUNITY TRUST WITH THE PERFORMANCE ROLE OF THE
VILLAGE GOVERNMENT AS THE MEDIUM (STUDY IN VILLAGES IN
JENEPONTO DISTRICT)***

**MUHAMMAD HUSNI
A062211021**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERAN KINERJA
PEMERINTAH DESA SEBAGAI PEMEDIASI (STUDI DI DESA SE-
KABUPATEN JENEPONTO)**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON
COMMUNITY TRUST WITH THE PERFORMANCE ROLE OF THE
VILLAGE GOVERNMENT AS THE MEDIUM (STUDY IN VILLAGES IN
JENEPONTO DISTRICT)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD HUSNI
A062211021**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERAN KINERJA PEMERINTAH
DESA SEBAGAI PEMEDIASI
(STUDI DI DESA SE-KABUPATEN JENEPONTO)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD HUSNI
A062211021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. R.A. Damayanti, SE., M.Soc.Sc., Ak., CA.
NIP. 19670319 199203 2 003

Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 19681125 199412 2 002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 19681125 199412 2 002

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Husni
NIM : A062211021
Jurusan/ Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERAN KINERJA PEMERINTAH
DESA SEBAGAI PEMEDIASI (STUDI DI DESA SE-KABUPATEN
JENEPONTO)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



(MUHAMMAD HUSNI)

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat dengan Peran Kinerja Pemerintah Desa sebagai Pemediasi (Studi di Desa se-Kabupaten Jeneponto)”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan yang terbaik hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari dan sangat bersyukur telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan gagasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. R.A. Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA selaku Pembimbing utama dan ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M. Si., CA. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian tesis.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, SE.,MM.,Ak.,CPMA., Bapak Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA., dan Bapak Dr. Syamsuddin, SE.,Ak., M.Si., CA. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada segenap pihak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Jeneponto atas pemberian izin untuk melakukan penelitian khususnya di Kabupaten Jeneponto. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh pengurus Badan Permusyawaratan Desa se-kabupaten Jeneponto yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT..

6. Kepada Ayahanda Sudirman, SE. dan Ibunda Almh. ST Nurhayati atas segala doa, kasih sayang dan dukungan semangatnya yang selama ini telah mendidik, membina, membesarkan, dan mendampingi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua adik tercinta Muh. Ilman Nur dan Abd. Ilah atas segala doa, dukungan dan semangatnya yang selama ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Om Drs. H. Jabal Rahman, M. Pd, tante Murniati dan Martati, S.Pd. beserta Bapak Dr. Basri Bado, M.Si dan Aiptu Inggil Wulantari telah banyak membantu dalam segala hal.
7. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hafiez Sofyani, Kak Sumarno, Kak Widyantono Arif, Kak Fadhil, Putri Ramadhani, Om Rusli Lau, atas bantuan dan masukan kepada penulis sampai terselesainya tesis ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan magister akuntansi Angkatan 2021, terkhusus MAKSI B atas bantuan, dukungan dan kebersamaan, selama proses perkuliahan sampai akhir studi.
9. Dan segenap pihak-pihak yang semuanya tidak disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
10. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 7 Maret 2023

Peneliti

ABSTRAK

MUHAMMAD HUSNI. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat dengan Peran Kinerja Pemerintah Desa sebagai Pemediasi: Studi di Desa se-Kabupaten Jeneponto* (dibimbing oleh R.A. Damayanti dan Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah desa sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan di 82 desa se-Kabupaten Jeneponto dengan waktu penelitian sejak September sampai dengan Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengujian hipotesis dan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 379 responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis WarpPLS dengan teknik *partial least square*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan kinerja pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, namun akuntabilitas tidak berpengaruh. Selain itu, ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berhubungan positif secara parsial terhadap kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hal itu, penelitian ini menyarankan instansi pemerintah desa meningkatkan kinerja untuk membangun kepercayaan daripada berfokus kepada akuntabilitas dan transparansi.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kinerja pemerintah desa, kepercayaan masyarakat desa demin dan Kemanasin



ABSTRACT

MUHAMMAD HUSNI. *The Effect of Accountability and Transparency on Community Trust with the Role of Village Government Performance as Mediator: A Study in Villages in Jeneponto Regency* (supervised by R.A Damayanti and Aini Indrijawati)

This study aims to examine the effect of accountability and transparency on public trust through the performance of village government as a mediating variable. This research was conducted in 82 villages in Jeneponto Regency from September to October. This research used a survey method with hypothesis testing and it was a quantitative study. The data consisted of primary data and obtained using questionnaires given to 379 respondents. They were analyzed using WarpPLS with partial least squares. The results indicate that the transparency and performance of the village government have a positive effect on public trust, but accountability has no effect. In addition, it is indicated that transparency and accountability are partially positively related to community trust through village government performance. Therefore, this study suggests that village government agencies improve their performance to build trust rather than focusing on accountability and transparency.

Keywords: accountability, transparency, village government performance, village community trust



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... | iv |
| PRAKATA..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis | 10 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis..... | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep..... | 12 |
| 2.2 Tinjauan Empiris | 19 |
| 2.2.1 Akuntabilitas..... | 19 |
| 2.2.2 Transparansi | 19 |
| 2.2.3 Kinerja Pemerintah Desa..... | 19 |
| 2.2.4 Kepercayaan Masyarakat Desa | 20 |
| | |
| BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS | 21 |
| 3.1 Kerangka Pemikiran..... | 21 |
| 3.2 Pengembangan Hipotesis..... | 24 |
| | |
| BAB IV METODE PENELITIAN..... | 29 |
| 4.1 Rancangan Penelitian..... | 29 |
| 4.2 Situs dan Waktu Penelitian..... | 29 |
| 4.3 Metode Pengambilan Sampel | 29 |
| 4.4 Jenis dan Sumber Data | 31 |
| 4.5 Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| 4.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Konstruksi | 32 |
| 4.7 Instrumen Penelitian | 33 |
| 4.8 Teknik Analisis Data | 33 |

| | |
|--|--------|
| BAB V HASIL PENELITIAN | 45 |
| 5.1 Deskripsi Data..... | 45 |
| 5.1.1 Gambaran Umum Responden..... | 45 |
| 5.1.2 Karakteristik Responden..... | 46 |
| 5.1.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian | 50 |
| 5.2 Analisis <i>Outliers</i> dan <i>Missing Value</i> | 54 |
| 5.3 Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>) | 55 |
| 5.3.1 Analisis Uji Validitas Konstruk | 55 |
| 5.3.2 Analisis Uji Reliabilitas Konstruk..... | 59 |
| 5.4 Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>) sebagai Uji Hipotesis | 60 |
| 5.5 Pembahasan Hipotesis..... | 65 |
| BAB VI PEMBAHASAN | 65 |
| 6.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa | 65 |
| 6.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa..... | 67 |
| 6.3 Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat..... | 69 |
| 6.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Kinerja Pemerintah Desa..... | 70 |
| 6.5 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Kinerja Pemerintah Desa..... | 72 |
| BAB VII PENUTUP | 74 |
| 7.1 Kesimpulan | 74 |
| 7.2 Implikasi | 75 |
| 7.3 Keterbatasan..... | 76 |
| 7.4 Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN..... | 85 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------------|--|---------|
| Tabel 4. 1 | Panduan menentukan ukuran sampel model SEM-PLS (Cohen, 1992)..... | 30 |
| Tabel 4. 2 | Definisi operasional variabel..... | 32 |
| Tabel 5. 1 | Tingkat Pengembalian Kuesioner | 46 |
| Tabel 5. 2 | Responden Berdasarkan Gender..... | 46 |
| Tabel 5. 3 | Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 47 |
| Tabel 5. 4 | Karakteristik Responden Berdasarkan Umur..... | 48 |
| Tabel 5. 5 | Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja | 49 |
| Tabel 5. 6 | Analisis Deskriptif Variabel Penelitian | 50 |
| Tabel 5. 7 | Deskripsi Akuntabilitas..... | 51 |
| Tabel 5. 8 | Deskripsi Transparansi | 52 |
| Tabel 5. 9 | Deskripsi Kinerja Pemerintah Desa..... | 53 |
| Tabel 5. 10 | Deskripsi Kepercayaan Masyarakat..... | 54 |
| Tabel 5. 11 | Hasil oleh data <i>Outlier</i> dan <i>Missing Value</i> | 55 |
| Tabel 5. 12 | <i>Combine loading</i> dan <i>Cross loading</i> sebelum penghapusan indikator | 56 |
| Tabel 5. 13 | Penghapusan indikator dengan nilai <i>Loading</i> < 0.40..... | 57 |
| Tabel 5. 14 | Nilai Average Variance Extracted (AVE) konstruk per konstruk..... | 58 |
| Tabel 5. 15 | Penghapusan indikator dengan nilai <i>Loading</i> > 0.40 - < 0.70 | 58 |
| Tabel 5. 16 | Nilai AVE setelah penghapusan indikator <i>Loading</i> > 0.40 – < 0.70..... | 58 |
| Tabel 5. 17 | Nilai akar kuadrat AVE untuk validitas diskriminan/ statistik deskriptif..... | 59 |
| Tabel 5. 18 | Nilai parameter reliabilitas sebelum penghapusan indikator | 60 |
| Tabel 5. 19 | Model Fit (kualitas model) | 61 |
| Tabel 5. 20 | Hasil analisis model struktural | 63 |
| Tabel 5. 21 | Hasil Eksplorasi Mediasi Metode Variance Extracted For (VAF) ... | 64 |
| Tabel 5. 22 | Rangkuman hasil pengujian hipotesis..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran | 23 |
| Gambar 3. 2 Kerangka Konseptual | 24 |
| Gambar 4. 1 Triangle SEM Model | 40 |
| Gambar 4. 2 Prosedur analisis mediasi dengan metode VAF (Hair <i>et al.</i> , 2013: 224)..... | 43 |
| Gambar 4 3 Prosedur mediasi kontemporer (Hair <i>et al.</i> , 2017)..... | 44 |
| Gambar 5. 1 Analisis jalur model untuk uji hipotesis | 62 |

DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Keterangan |
|---------------|--|
| 1. PMK | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2. APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| 3. BPD | Badan Permusyawaratan Desa |
| 4. SEM..... | <i>Structural Equation Modelling</i> |
| 5. PLS..... | <i>Partial Least Square</i> |
| 6. KKN | Korupsi Kolusi Nepotisme |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1 Kuesioner Penelitian..... | 86 |
| Lampiran 2 Peta Teori..... | 91 |
| Lampiran 3 Hasil Olah Data Statistik..... | 99 |
| Lampiran 4 Surat Izin dan Tanda Bukti telah Melaksanakan Pengumpulan Data Penelitian..... | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran masyarakat dituntut pada praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana kepercayaan masyarakat menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan dan pelayanan yang diberikan pemerintah (Pratolo *et al.*, 2022). Selain itu, kepercayaan masyarakat menjadi variabel penting terwujudnya pemerintahan yang baik sebab menghasilkan legitimasi publik yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik maupun dukungan sosial masyarakat dalam aktivitas pemerintahan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah salah satu langkah menuju pemerintahan yang baik (Putra, 2017).

Kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, khususnya pada pembangunan dan pengimplementasian kebijakan *good governance*. Munir *et al.*, (2020) menemukan penerapan *good governance* belum sepenuhnya berhasil sebab pengelolaan anggaran sebagai salah satu produk *good governance* pada penerapannya masih terdapat kecurangan yang tergolong tinggi dan tercermin pada kurangnya pembangunan. Rentannya penyalahgunaan anggaran dikarenakan kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan partisipasi masyarakat (Zakariya, 2020). Peningkatan partisipasi masyarakat dapat didorong oleh kepercayaan masyarakat, sehingga peningkatan partisipasi masyarakat sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

Pentingnya kepercayaan masyarakat juga ditunjukkan dengan tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negara maju di Eropa. Spiteri dan Briguglio (2018) meneliti 29 negara maju di Eropa dan mengungkapkan seluruhnya memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah, ada dua faktor yang menyebabkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu akuntabilitas terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, menjaga transparansi secara optimal, memberikan akses informasi penting mengenai program pengelolaan keuangan dan meningkatkan kinerja pemerintah desa merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sofyani *et al.*, 2022).

Hasil survei dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2022) menunjukkan Indonesia memiliki tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk tahun 2017-2020 kedua tertinggi dengan persentase sebesar 80%. Meski Indonesia memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah berdasar hasil survei dari *Organisation for Economic Co-operation and Development*, pemerintah yang dimaksud masih bersifat umum karena pemerintah di Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah desa sebagai salah satu bagian pemerintah daerah cenderung memiliki kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintah desa, ini dapat terlihat dari partisipasi masyarakat (sebagai faktor penyebab tingginya kepercayaan masyarakat) dalam pembangunan desa masih bersifat simbolis karena masyarakat hanya diwakili oleh kepala desa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan tidak melibatkan masyarakat (Damayanti, 2020). Selain karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa yang rendah, pemerintah desa dipilih sebagai objek penelitian karena pemerintah desa memiliki struktur organisasi dan administrasi yang menyerupai pemerintah kabupaten dan provinsi sejak era otonomi desa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui badan permusyawaratan desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga legislatif, tidak hanya itu desa mempunyai hak untuk mendirikan badan usaha milik desa, hak untuk menentukan kepala desa melalui mekanisme pemilihan langsung dan praktik tata kelola desa seperti partisipasi masyarakat desa dalam pertemuan desa yang bertujuan perencanaan pembangunan, pemantauan anggaran, pengelolaan aset, akuntabilitas dan transparansi yang telah menjadi kewajiban.

Pemerintah desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disyaratkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, peningkatan tata kelola pemerintahan dapat diwujudkan melalui penerapan *good governance* secara terstruktur dan sistematis agar desa tidak hanya mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga mampu meningkatkan daya saing desa. Kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan partisipasi dan pengakuan eksistensi pemerintah desa yang dapat memicu pembangunan dengan hasil yang optimal guna mencapai visi dan misi yang berujung pada kemandirian desa (Sofyani, 2018).

Kepercayaan masyarakat (sebagai pendorong peningkatan partisipasi masyarakat) terhadap pemerintah memiliki sifat yang dinamis, sebab kepercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk karena bergantung pada harapan masyarakat terhadap pemerintah (Dwiyanto, 2013:440). Maka dengan itu pemerintah harus dapat mengelola kepercayaan dengan baik sebab kepercayaan menghasilkan legitimasi yang dapat menciptakan modal sosial bagi

pemerintah dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah (Putra, 2017). Salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat sebagai komponen penting terhadap pemerintah desa adalah meningkatkan dan menjaga transparansi dan kinerja aparat desa (Sofyani, 2022).

Dasar kebijakan mengenai pemerintahan desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memperoleh otonomi penuh dalam urusan pemerintahan dengan mengedepankan asas gotong royong dan kekeluargaan pada penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah desa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 desa memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belanja daerah kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini, total pagu dana desa untuk tahun 2021 sebesar Rp72 triliun yang disalurkan ke 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa (setkab.go.id, 2022). Jumlah tersebut tergolong besar untuk membiayai satu desa setiap tahunnya dan ketika di rata-ratakan, satu desa menerima Rp950 juta. Besarnya dana desa menjadi kekhawatiran karena dianggap menjadi ladang penyalahgunaan dana pada pemerintah desa. Kondisi ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan dana desa yang cukup konsisten sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Indonesia *corruption watch*, 2021).

Tahun 2015 penyalahgunaan dana desa hanya berjumlah 17 kasus, dan meningkat sampai 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233,3 miliar rupiah dengan pelaku korupsi dana desa mayoritas

dilakukan kepala dan aparatur desa (Indonesia *Corruption Watch*, 2022). Kabupaten Jeneponto juga memiliki sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa diantaranya kasus dugaan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2021 (iNewsSulsel.id, 2021), kasus kepala desa tahun 2020 yang menyalahgunakan dana desa kurang lebih Rp1,7 miliar rupiah selama menjabat satu periode dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri (Jurnalmetropol.com, 2020). Kondisi ini menjadi argumen bagi masyarakat untuk tidak memercayai pemerintah desa. Sementara itu kepercayaan masyarakat desa dibutuhkan dalam mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat (Singgalen, 2019).

Salah satu strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah penerapan praktik akuntabilitas dan transparansi. Praktik akuntabilitas dan transparansi merupakan dua dari delapan aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat ini di didukung oleh *stakeholder theory*. *Stakeholder theory* menyebutkan bahwa kelangsungan hidup organisasi tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari melalui aktivitas organisasi (Gray, 1995). Pemerintah desa sebagai organisasi yang mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan harus memperoleh dukungan dari masyarakat, dukungan dapat diperoleh melalui aktivitas pemerintahan dan pembangunan desa, salah satunya adalah meningkatkan transparansi dan kinerja perangkat desa. Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban dari kewajiban organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban dilakukan dengan memuaskan (mengacu pada peraturan) dan dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban menjalankan

tugas dengan tidak dapat didelegasikan (McGrath dan Whitty, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sofyani (2022) yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kinerja pemerintah desa dapat menjadi variabel mediasi untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. Kinerja pemerintah desa dan kepercayaan masyarakat ini didukung oleh *performance theory*. *Performance theory* menunjukkan bahwa setiap orang menampilkan kinerja dalam masyarakat sebagai identitas yang memberikan informasi bagi orang lain dalam kelompok sosial dimana mereka berada (Goffman, 1959: 28). *Performance theory* dalam penelitian ini mendasari kinerja pemerintah desa. Bouckaert dan Walle (2014) mengemukakan bahwa tingkat kinerja pemerintah yang baik dalam hal ini mengenai pemberian layanan akan menghasilkan lebih banyak kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan menuntut kinerja dan menilai pemerintah desa atas layanan yang diberikan. Perangkat pemerintah desa harusnya memperlihatkan kinerja yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga masyarakat dapat percaya dengan kinerja yang diperlihatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Purnamasari (2022) yang mengemukakan bahwa kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (Sofyani, 2022). Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan kontrol dan partisipasi masyarakat (Wanusmawatie, 2020). Baik *stakeholder theory* dan *performance theory* keduanya merupakan teori yang

berasal dari sudut pandang sektor swasta, namun instrumen yang sama digunakan di sektor swasta juga berperan di sektor publik, dalam hal ini sarana pengungkapan yang terdiri dari akuntabilitas dan transparansi (Darmawati, 2019).

Akuntabilitas, transparansi, kinerja pemerintah dan kepercayaan masyarakat desa telah banyak diteliti. Penelitian sebelumnya menguji hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat, hasilnya menunjukkan transparansi berhubungan positif dengan kepercayaan masyarakat tetapi akuntabilitas tidak berhubungan positif dengan kepercayaan masyarakat (Sofyani dan Tahar, 2021). Selanjutnya penelitian dari Sofyani (2022) menguji kembali hubungan akuntabilitas dan transparansi yang masing-masing memiliki variabel anteseden: kompetensi staf pemerintah desa dan komitmen organisasi terhadap kepercayaan masyarakat desa, hasilnya kompetensi staf pemerintah desa dan komitmen organisasi berhubungan positif dengan akuntabilitas, namun komitmen dan akuntabilitas organisasi tidak terkait dengan transparansi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2013) yang menemukan ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi daerah terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Aprilia (2019) menemukan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa serta transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa. Sedangkan Fard dan Rostamy (2007) juga menemukan bahwa akuntabilitas publik memengaruhi kepercayaan publik dengan meningkatkan kepuasan masyarakat. Penelitian Purnamasari (2022) juga menguji hubungan akuntabilitas terhadap alokasi dana desa dengan peran transparansi dan kinerja pemerintah sebagai pemediasi, hasilnya menunjukkan

terdapat hubungan langsung antara akuntabilitas dan alokasi dana desa, serta dapat dimediasi oleh transparansi dan kinerja masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Purnamasari (2022) dan Sofyani (2022) terletak pada perbedaan variabel independen dan variabel mediasi. Kepercayaan terhadap pemerintah desa sebagai variabel independen dan kinerja pemerintah sebagai variabel mediasi. Variabel mediasi ditambahkan dengan harapan bahwa dengan adanya kinerja pemerintah desa dapat menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam meneliti kepercayaan masyarakat desa. Fokus objek penelitian sebelumnya yang dilakukan Sofyani *et al.*, (2022) menyebutkan fokus penelitian pemerintah desa masih berdasar pada karakteristik dan budaya yang sama, seperti desa-desa di Jawa, Bali dan beberapa daerah di Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Penelitian terkait akuntabilitas, kinerja pemerintah desa, transparansi dan kepercayaan masyarakat desa sebagian besar dilakukan di pemerintah desa dengan berfokus pada pulau Jawa antara lain (Ngakil dan Kaukab, 2020; Purnamasari *et al.*, 2022; Hafiez Sofyani *et al.*, 2020; Suwanti Suwanti dan Hermanto, 2020), pulau Bali, Sumatera dan Kalimantan seperti pada penelitian (Aprilia, 2019; Basri *et al.*, 2021; Laka, 2020). Pemerintah desa di Kabupaten Jeneponto yang berada di provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai subjek selain karena kurangnya penelitian tentang pemerintahan desa diluar pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Kalimantan juga didasarkan pada tingkat pembangunan pemerintah desa dari sisi infrastruktur dan pendapatan desa, dengan tingkatan mandiri, maju, dan berkembang sehingga mendapatkan hasil yang mencakup desa-desa dengan karakteristik yang berbeda.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan kembali karena berdasarkan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi tetapi

terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang menjadi penyebab masyarakat untuk tidak percaya terhadap pemerintah desa dan beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil tidak konsisten (*research gap*).

Adanya gap penelitian antara variabel kinerja pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan penelitian untuk menguji hubungan antar variabel tersebut terhadap kepercayaan masyarakat desa dengan menambah kinerja pemerintah desa sebagai variabel mediasi dengan tujuan untuk menutupi kesenjangan yang disoroti di atas, serta membantu menjelaskan peran akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, kinerja pemerintah desa sebagai variabel mediasi juga didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *stakeholder theory* dimana organisasi (pemerintah desa) beroperasi tidak hanya untuk kepentingan dirinya tetapi harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (masyarakat) dan kelangsungan hidup organisasi tergantung dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari melalui aktivitas organisasi (kinerja pemerintah).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah tersebut dapat diuraikan melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?.
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
3. Apakah kinerja pemerintah desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?.

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah desa?.
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah desa?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat.
4. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah desa.
5. Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat melalui kinerja pemerintah desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat yang diharapkan juga dapat memediasi transparansi dan kinerja pemerintah desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian, dimana diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah desa yang lebih aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat desa.
- b. Masyarakat desa yang akan lebih berpartisipasi dalam pembangunan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini. Sistematika penulisan terdiri dari enam bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian, bab pembahasan, serta bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisikan teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab ini menguraikan kajian teoritis dan empiris serta pengembangan hipotesis.

Bab IV merupakan metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang dilakukan.

Bab V merupakan hasil penelitian. Bab ini berisikan deskripsi data yang dijelaskan dengan statistik deskriptif dan deskripsi hasil penelitian yang dijelaskan secara sistematis dengan data dan temuan yang diperoleh.

Bab VI merupakan penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah, saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait serta hambatan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

2.1.1 *Stakeholder theory*

Stakeholder theory yang dikemukakan Freeman (1984) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian, tujuan atau kinerja organisasi. *Stakeholder theory* mengemukakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Kelangsungan hidup organisasi tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut dapat dicari dari aktivitas organisasi (Gray, 1995).

Donaldson dan Preston (1995) mengategorikan literatur *stakeholder theory* dengan tiga kategori yaitu: deskriptif, instrumental dan normatif.

1. Pendekatan deskriptif menjelaskan karakteristik dan perilaku organisasi melalui konsep yang diuraikan dalam teori, dan menggabungkan penelitian empiris saat ini.
2. Pendekatan instrumental mengidentifikasi hubungan antara manajemen, pemangku kepentingan dan tujuan organisasi konvensional.
3. Pendekatan normatif menafsirkan fungsi korporasi dalam kaitannya dengan pedoman moral atau filosofis dasar.

Perbedaan yang jelas antara ketiga pendekatan tersebut adalah bahwa pendekatan normatif bersifat kategorisasi, pendekatan instrumental pada dasarnya hipotesis dan pendekatan deskriptif yang menentukan kategorisasi dan

hipotesis. Meskipun *stakeholder theory* secara eksplisit adalah teori tentang entitas sektor swasta, tetapi teori ini dapat diterapkan pada organisasi sektor publik (Scholl, 2001).

Stakeholder theory menyatakan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian, tujuan atau kinerja organisasi dalam hal ini adalah pemerintah desa, dengan tidak beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (masyarakat). Selain itu kelanjutan pemerintahan desa tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari dari aktivitas pemerintahan desa.

2.1.2 Performance theory

Performance theory menggambarkan kinerja setiap orang dalam masyarakat, baik melalui pakaian, percakapan yang semuanya adalah pertunjukan yang dirancang sebagai sinyal bagi diri sendiri dan orang lain di tempat atau kelompok sosial kita berada (Goffman, 1970). *Performance theory* menyiratkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki kepentingan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan secara umum (Bouckaert dan Walle, 2014).

Performance theory membentuk kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan kinerja serta peningkatan kerja dengan mengembangkan dan menghubungkan enam konsep dasar. Enam konsep dasar terdiri dari konteks, tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, identitas, faktor pribadi dan faktor tetap (Elger, 2007). *Performance theory* dalam penelitian ini mendasari kinerja pemerintah desa. Bouckaert dan Walle (2014) mengemukakan bahwa tingkat kinerja pemerintah yang baik dalam hal ini mengenai pemberian layanan akan menghasilkan lebih banyak kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan menuntut kinerja dan menilai pemerintah desa atas layanan yang diberikan.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah syarat terpenting bagi pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2021:251) adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang diambil. Akuntabilitas berbeda dengan tanggung jawab, akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban dari kewajiban organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban dilakukan dengan memuaskan (mengacu pada peraturan) dan dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban menjalankan tugas dengan tidak dapat didelegasikan (McGrath dan Whitty, 2018).

Secara umum organisasi atau lembaga bertanggung jawab kepada mereka yang terpengaruh oleh keputusan atau tindakannya. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan supremasi hukum (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and India, 2000*). Akuntabilitas mengacu pada proses pertanggungjawaban kepada beberapa otoritas atas tindakan seseorang (Jones, 1992). Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas segala kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, menumbuhkan kesadaran masyarakat, keterwakilan berdasar pilihan dan kepentingan meningkat, serta menurunnya kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) (Huther dan Shah, 1998:70). Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif

akuntansi (*accounting perspective*) dan perspektif fungsional (*functional perspective*) (Sadjiarto, 2000).

Akuntabilitas dari perspektif akuntansi (*accounting perspective*) *American Accounting Association* dalam Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas dari entitas pemerintah dibagi menjadi empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial.
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan internasional.
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan.
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Akuntabilitas dari perspektif fungsional (*functional perspective*), akuntabilitas dibagi menjadi lima tahap yang berbeda (Stewart, 1984). Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan upaya menghindari penyalahgunaan jabatan, sementara akuntabilitas hukum memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan saat menggunakan dana yang bersumber dari publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan ketersediaan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi yang cukup baik atau tidak.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan alternatif

program sehingga menghasilkan hasil optimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada akuntabilitas pemerintah atas kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat.

2.1.4 Transparansi

Transparansi berarti membuat dan melaksanakan keputusan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang terpengaruh oleh keputusan yang dibuat. Ini juga berarti bahwa transparansi berkaitan pemberian informasi dengan baik dan disediakan dalam format dan media yang mudah dipahami (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and India, 2000*).

Transparansi sebagai keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan. Informasi tersebut berisi penjelasan kepada masyarakat terkait proses penyusunan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai setiap kebijakan yang dibuat (Nazir, 2017).

Selain itu transparansi dibuat untuk mengatasi perbedaan informasi, sehingga publik dapat menilai dan melihat apa yang terjadi dalam pemerintahan (Matheus dan Janssen, 2020). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi menurut (Huther, 1998:68) dan (Matheus, 2020) yaitu:

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap masyarakat.
3. Mengurangi pelanggaran peraturan.
4. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Mengatasi asimetri informasi.

2.1.5 Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja merupakan olahan hasil pekerjaan pada organisasi yang didasarkan kebijakan organisasi dengan berorientasi hasil kegiatan yang telah dilakukan dengan maksud mengetahui sejauh mana organisasi mencapai tujuannya (Curristine, 2005). Faktor utama dalam pengembangan suatu organisasi secara efektif dan efisien dengan menilai pencapaian tujuan pelaksanaan fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, investigasi, pengoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan dalam memajukan kepentingan umum organisasi (Mahoney *et al.*, 1965b).

Performance theory yang mendasari kinerja pemerintah desa pada penelitian ini menyiratkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki kepentingan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan secara umum (Bouckaert dan Walle, 2014). Sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan menuntut kinerja dan menilai pemerintah desa atas layanan yang diberikan.

Kinerja pemerintah desa, dalam mengetahuinya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti partisipasi anggaran dan ketidakpastian lingkungan (Sofyani, 2020). Partisipasi anggaran dibutuhkan sebagai instrumen strategis pemerintah untuk mengendalikan perencanaan dan mengoordinasi sumber daya yang dimiliki (Crain dan O'Roark, 2004).

Faktor lain yang memengaruhi kinerja pemerintah desa adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan pemerintah desa dapat menghambat kinerja aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan organisasinya. Sumber ketidakpastian lingkungan meliputi permintaan atau aspirasi masyarakat, peraturan baru dan perubahan teknologi (Govindarajan, 2019). Ketidakpastian lingkungan pada konteks desa disebabkan oleh

banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah desa seperti akuntabilitas, transparansi, kinerja dan tujuan organisasi (Basuki dan Ridha, 2012).

Akuntabilitas pada konteks pemerintahan terkait pada perolehan informasi publik mengenai kegiatan, program dan kinerja baik keuangan maupun non keuangan (Mardiasmo, 2021).

1. Kinerja keuangan organisasi sektor publik harus mempertimbangkan aspek keuangan dalam kinerja yang salah satunya adalah konsep *value for money* yang menjadi inti pengukuran kinerja di unit pemerintah (Bone, 2017).
2. Kinerja non keuangan sektor publik berkaitan dengan pelayanan yang diberikan ke masyarakat sebagai penerima layanan. Menurut Dwiyanto (2008), penilaian kinerja organisasi publik tidak hanya dilakukan secara sederhana dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dilihat dari indikator yang melekat pada layanan pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna.

2.1.6 Kepercayaan Masyarakat Desa

Konsep kepercayaan berkaitan erat dengan risiko dan harapan. Kepercayaan digunakan sebagai pengganti risiko tetapi dapat pula menciptakan risiko bagi pihak yang mewakili kepentingan, sehingga pihak mewakili kepentingan bertindak sesuai peraturan dengan tidak mengambil risiko (Bouckaert dan Walle, 2014). Kepercayaan sebagai sub kategori risiko yang menentukan apakah seseorang akan memberikan kepercayaan atau tidak (Coleman, 1994).

Kepercayaan selalu bersyarat dan kontekstual karena kepercayaan tidak pernah mutlak. Jika tidak ada harapan, pilihan atau kepastian maka tidak dapat berbicara tentang kepercayaan. Kepercayaan terdiri dari tujuh faktor yaitu

keteraturan, efisiensi, reliabilitas, keterwakilan, keadilan, akuntabilitas dan kebajikan (Sztompka, 1996).

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Akuntabilitas

Berikut penelitian yang telah dilakukan terkait akuntabilitas dan relevan dengan penelitian ini. Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dengan mengedepankan pencegahan pengelolaan keuangan dan membuat laporan keuangan secara berkala mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa (Ngakil dan Kaukab, 2020). Akuntabilitas juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa dan berperan penting pada peningkatan kepercayaan masyarakat desa (Aprilia, 2019). Selain itu, Purnamasari (2022) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa dan dimediasi oleh transparansi dan kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan langsung antara akuntabilitas dan alokasi dana desa, serta dapat dimediasi oleh transparansi dan kinerja pemerintah desa.

2.2.2 Transparansi

Berikut penelitian yang telah dilakukan terkait transparansi dan relevan dengan penelitian ini. Transparansi mempunyai hubungan positif dengan kepercayaan masyarakat desa tetapi transparansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas (Sofyani, 2021). Penelitian lainnya menunjukkan hubungan antara transparansi dan kepercayaan masyarakat dapat dimediasi oleh kinerja pemerintah (Alessandro, 2021). Selain itu, transparansi dan kinerja pemerintah desa dapat memediasi hubungan antara akuntabilitas dengan alokasi dana desa (Purnamasari *et al.*, 2022).

2.2.3 Kinerja Pemerintah Desa

Berikut penelitian yang telah dilakukan terkait kinerja pemerintah desa

dan relevan dengan penelitian ini. Kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat (Basri *et al.*, 2021). Penelitian lainnya menunjukkan kinerja pemerintah desa dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas (Laka, 2020). Sejalan dengan itu, Suwanti dan Hermanto (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

2.2.4 Kepercayaan Masyarakat Desa

Berikut penelitian yang telah dilakukan terkait kepercayaan masyarakat desa dan relevan dengan penelitian ini. Kepercayaan masyarakat desa dipengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini dipersepsikan adanya transparansi, akuntabilitas dan daya tanggap kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah (Beshi dan Kaur, 2020). Penelitian lainnya menemukan secara parsial transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Nurrizkiana *et al.*, 2017). Sejalan dengan itu, transparansi secara positif terkait dengan kepercayaan masyarakat desa (Sofyani *et al.*, 2022).